



**INTEGRASI NASIONAL
DALAM PERSPEKTIF SEJARAH INDONESIA
SEBUAH PROSES YANG BELUM SELESAI**

PIDATO PENGUKUHAN

Disajikan pada Upacara
Penerimaan Jabatan Guru Besar
dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra
Universitas Diponegoro
di Semarang, 9 Februari 2002

Oleh :

Agustina Magdalena Djuliati Suroyo

Yang saya muliakan,

Bapak Rektor/Ketua Senat dan Sekretaris Senat
Universitas Diponegoro,
Para anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro,
Para anggota Senat dan Dewan Guru Besar Universitas
Diponegoro,
Para Guru Besar tamu,
Para anggota Muspida Propinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kota Semarang,
Para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro,
Para Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Direktur
Program Pasca Sarjana, Asisten Direktur Program Pasca
Sarjana, Ketua Program Magister dan Program Doktor,
serta Sivitas Akademika Universitas Diponegoro,
Para Rektor PTN dan PTS,
Para tamu undangan yang saya hormati, dan
para mahasiswa yang saya cintai.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas segala rahmat dan
karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga
kita dapat menghadiri rapat senat terbuka Universitas
Diponegoro dalam rangka peresmian penerimaan jabatan
guru besar. Perkenankanlah saya mengucapkan terima
kasih kepada hadirin yang telah berkenan meluangkan
waktu untuk menghadiri upacara pengukuhan ini.

Adalah suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi
saya bahwa pada hari ini saya mendapat kesempatan
untuk menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar
dalam Ilmu Sejarah di hadapan majelis yang mulia.

Pada saat ini kita telah memasuki milenium ketiga,
menginjak abad ke-21 yang bercirikan meningkatnya
kekuatan globalisasi ekonomi, yang semakin menguasai
semua bangsa dan semua wilayah di muka bumi.
Globalisasi ini ditunjang oleh kecanggihan teknologi

komunikasi, sehingga peristiwa dan tindakan manusia apa pun, dimana pun, kapan pun, dapat diketahui dalam sekejap. Yang lebih penting, peristiwa tersebut dapat menyulut reaksi keras dan mengguncang kehidupan manusia di sebagian besar dunia dalam sekejap pula, tak terkecuali di negara kita, seperti penabrakan pesawat ke gedung WTC di New York, 11 September 2001.

Saat ini bangsa Indonesia, masih mengalami krisis multidimensi yang menggoyang kehidupan kita sebagai bangsa sejak gerakan Reformasi bergulir tahun 1997, yang mengakibatkan runtuhnya pemerintah Orde Baru. Salah satu masalah utama dari krisis besar itu adalah ancaman disintegrasi bangsa, yang hingga saat ini, setelah pergantian pemerintahan dan pergantian presiden hingga tiga kali, ancaman disintegrasi bangsa masih belum mereda, seperti pergolakan di Aceh, Papua Barat, dan daerah lain, setelah kita kehilangan Timor Timur pada tahun 1999. Mengingat disintegrasi bangsa atau disintegrasi nasional ini berkaitan langsung dengan eksistensi kita sebagai satu bangsa, izinkanlah saya dalam kesempatan ini mengangkat tema, yaitu :

INTEGRASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH INDONESIA : SEBUAH PROSES YANG BELUM SELESAI.

Hadirin yang mulia,

Integrasi nasional pada hakikatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dalam realitas integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi, saling ketergantungan ekonomi antardaerah yang bekerjasama secara sinergis), dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya, hubungan antara suku, lapisan dan golongan).

*Pengertian
integrasi
nasional*

Secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (*nation*) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama (Drake, 1989:16). Selanjutnya, dalam menjalani proses pembentukan sebagai satu bangsa berbagai suku bangsa ini sebenarnya mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan (*imagined political community*) akan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas serta memiliki kekuasaan memerintah (Anderson, 1983:15-16). Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif, dan dimensi horisontal, yaitu hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial (Sjamsuddin, 1989:2).

Hadirin yang berbahagia,

Marilah kita lihat bagaimana proses pembentukan persatuan bangsa Indonesia menurut pengalaman sejarahnya. Bukan secara kebetulan bahwa masyarakat yang kita cita-citakan terpampang dalam lambang negara Republik Indonesia BHINNEKA TUNGGAL IKA, berbeda-beda namun satu jua. Semboyan ini berakar dari sejarah pada masa kerajaan Majapahit, diangkat dari karya *kakawin* Sutasoma ciptaan Empu Tantular, menggambarkan berkembangnya agama-agama, sekte-sekte agama dan kepercayaan yang berbeda-beda namun hidup berdampingan secara damai, karena hakikatnya satu: menyembah Tuhan Sang Pencipta (Poerbatjaraka, 1957:40-45).

*Proses
pembentuk
an persatu
an bangsa*

Demikian pula dengan bangsa Indonesia yang berangkat dari suku bangsa yang beraneka ragam berikut banyak keberagaman lain yang melekat pada dirinya. Keberagaman, atau lebih lazim disebut perbedaan yang dimiliki bangsa ini meliputi antara lain wilayah kepulauan yang demikian tersebar di antara kawasan-kawasan laut di Nusantara, geografi, ekologi, sistem mata pencaharian, ratusan budaya etnis atau lokal, agama, kepercayaan, dan bahasa (Wertheim, 1999:1-10; Koenjaringaningrat, 1971).

Di samping keberagaman atau perbedaan, berbagai suku bangsa di Indonesia juga memiliki beberapa kesamaan. Pertama, adalah bahasa perhubungan antar-suku dan antarbangsa (*lingua franca*), yaitu bahasa Melayu yang dikenal dan digunakan oleh semua suku dan orang-orang asing yang mengunjungi seluruh kepulauan Indonesia, bahkan tersebar hingga ke Asia Tenggara, pantai timur Afrika, Jazirah Arab, Asia Selatan, dan Taiwan. Kedua, budaya penghormatan roh nenek moyang yang dilaksanakan dengan berbagai bentuk sesaji/penghormatan makam leluhur, pensakralan makam nenek moyang atau ritual kematian. Ketiga, budaya pembuatan dan penggunaan jenis kapak batu, anak panah, dan berbagai peralatan lain dari batu, dan perunggu pada budaya palaeolithicum, mezolithicum, dan neolithicum. Budaya yang tersebar dari daratan Asia Tenggara ke Sumatera hingga Papua Barat menunjukkan adanya persamaan tingkat budaya dan hubungan budaya yang telah terjalin antara berbagai suku (Soejono, 1984; Koentjaraningrat, 1971:-21). Keempat, budaya bahari (maritim), yaitu kemampuan berlayar, pengetahuan alam kelautan, dan teknologi perkapalan yang telah dimiliki suku-suku di Indonesia yang meniscayakan mereka saling berkomunikasi untuk aktivitas ekonomi (perdagangan), sosial (mobilitas penduduk), budaya (perjumpaan budaya, penyebaran agama) dan aktivitas politik (kunjungan pejabat, atau penyerbuan) (Tjandrasasmita, 1984:102-172; PUSPINDO, 1990; Manguin, 1993:197-213; Lopian, 1992).

Kelima, adalah kesamaan sejarah bahwa semua suku bangsa Indonesia mengalami penjajahan kolonial Barat yang merendahkan harga diri kita sebagai suku bangsa yang berdaulat, dan menyebabkan keterbelakangan di segala bidang.

Dengan adanya berbagai perbedaan di satu sisi dan kesamaan-kesamaan pada sisi lain, cukup beralasan bagi berbagai suku di Indonesia untuk bersatu. Motto *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai lambang kesatuan bangsa atau integrasi nasional masih relevan untuk digunakan, dengan substansi agak berbeda namun sama dalam makna.

Hadirin yang mulia,

Apabila sejarah menurut filsuf Leopold von Ranke adalah memberi jawaban kepada apa yang sesungguhnya terjadi pada masa lampau (Nash, 1969:4), sedangkan Taufik Abdullah lebih menekankan sejarah sebagai dialog dengan masa lalu, sehingga cerita sejarah ditentukan oleh jenis pertanyaan yang dirumuskan (Abdullah, 2001:98-99), maka pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya terjadi dengan proses integrasi nasional bangsa ini, sehingga setelah 56 tahun Indonesia Merdeka integrasi bangsa terasa masih rapuh oleh ancaman disintegrasi?.

Secara historis sebenarnya Indonesia pernah memiliki model integrasi nasional yang meliputi wilayah hampir seluas Negara Republik Indonesia (RI). Yang pertama adalah kemaharajaan (*imperium*) Majapahit (abad XIV-XV). Struktur kemaharajaan yang begitu luas diperkirakan berbentuk mirip kerajaan Mataram Islam, yaitu struktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (*nagaragung*): pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya, menerapkan sistem pemungutan pajak langsung untuk biaya hidup keluarga raja. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (*maricanegara dan pasisiran*) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom,

**Model
integrasi
nasional :
imperium
Majapahit**

atau kerajaan tertakluk yang mengakui hegemoni Majapahit, dengan kebebasan penuh mengatur negeri mereka masing-masing. Kewajiban terhadap negara pusat hanya menghadap maharaja Majapahit dua kali setahun dengan membawa upeti sebagai pajak. Konsentris ketiga (*tanah sabrang*) adalah negara-negara sahabat dimana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudya-pura (Thailand). Integrasi vertikal dibangun melalui penguasaan maritim, hubungan pusat dan daerah dibina melalui hubungan perdagangan dan kunjungan pejabat. Ekspedisi angkatan laut (*jaladi*) digunakan apabila terjadi pembangkangan, seperti yang diceritakan dalam *Hikayat Raja-raja Pasai*. Kewibawaan Majapahit tercermin dalam berbagai hikayat maupun tradisi lisan dari berbagai daerah di Nusantara, selain dalam *Nagarakertagama* (Alfian, 1999: 33-43; Holben, 1992: 212-231; Moertono, 1974: 111-112; Hall, 1985: 232-260). Disintegrasi Majapahit terjadi karena *pertama*, kelemahan di pusat kekuasaan (konflik perebutan takhta). *Kedua*, saling pengaruh antara faktor ekonomi, kemakmuran kota-kota pelabuhan, dan faktor budaya, berkembangnya agama Islam, yang membentuk solidaritas dan integrasi horizontal kerajaan-kerajaan pesisir di daerah melawan kekuasaan Majapahit di pusat.

Integrasi nasional kedua, lebih tepat disebut dengan integrasi kolonial, atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada dekade kedua abad XX dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial, yang terdiri dari *ambtenaar-ambtenaar* (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Masyarakat kolonial yang pluralistik dan segregatif

**Integrasi
kolonial**

memisahkan golongan kulit putih, Cina dan pribumi yang membawa kelemahan pada integrasi sosial budaya. Dengan demikian ketika menghadapi serbuan tentara Jepang pada masa Perang Dunia II, integrasi kolonial Hindia Belanda ini langsung runtuh, tanpa massa rakyat yang menopangnya.

Hadirin yang mulia,

Sebelum menguraikan terbentuknya integrasi nasional Indonesia, marilah kita lihat bagaimana bangsa (*nation*) Indonesia terbentuk.

Hingga akhir abad XIX berbagai kerajaan kesukuan di wilayah yang kini bernama Indonesia berjuang melawan kekuasaan kolonial Belanda dengan menggunakan cara perlawanan bersenjata. Perlawanan yang dipimpin oleh penguasa kerajaan atau elit lokal bersama rakyat mereka berakhir dengan kekalahan, hingga seluruh kerajaan-kerajaan tersebut dikuasai pemerintah kolonial dan menjadi wilayah taklukan Hindia Belanda (kecuali Aceh yang baru ditaklukkan tahun 1913). Namun perlawanan skala kecil, sporadis di tingkat akar rumput, dalam bentuk protes dan perlawanan petani terus berjalan hingga akhir penjajahan (Kartodirdjo, 1973). Menginjak abad XX, seiring dengan perubahan politik kolonial di dalam negeri untuk memajukan rakyat jajahan sebagai "balas budi" (*Ethische Politiek*), maupun pengaruh perkembangan nasionalisme di luar negeri, perjuangan melawan penjajahan mengalami babak baru, yaitu menggunakan bentuk-bentuk perjuangan politik dan kultural melalui organisasi-organisasi moderen yang dikenal sebagai pergerakan nasional.

***Proses
integrasi
nasional***

Pada awal abad XX "Bangsa Indonesia" masih merupakan kawula (*subject*) dari negara kolonial Hindia Belanda. Dalam arti ini perlu dikemukakan bahwa pengertian bangsa (*nation*) sebagai konsep politik masih relatif baru. Secara historis ia lahir sebagai anak revolusi rakyat yang membebaskan diri dari kekuasaan absolut dan

mendirikan negara merdeka yang berkonstitusi. Faham kebangsaan di elopori oleh revolusi rakyat Inggris (1654), dilanjutkan revolusi rakyat Amerika Serikat (1776) dan mencapai puncaknya pada revolusi rakyat Perancis (1789) (Kohn, 1984:21-34; Hobsbawn, 1992:21-22). Seterusnya faham bangsa dan semangat kebangsaan atau nasionalisme (semangat mencintai dan membela bangsa) terus tumbuh berkembang dan menjalar di banyak negara di dunia. Khusus di negara-negara jajahan, faham bangsa dan semangat kebangsaan menjadi cambuk perjuangan kemerdekaan.

Hadirin yang mulia,

Di Indonesia kesadaran berbangsa mulai timbul di kalangan golongan terpelajar – mahasiswa dari kawula Hindia Belanda pada dekade pertama abad XX, justru sebagai “produk sampingan” dari hasil pendidikan kolonial yang tidak diharapkan oleh pemerintah Kolonial. Para mahasiswa inilah yang menumbuhkembangkan kesadaran kebangsaan dengan mendirikan organisasi *Budi Utomo* pada tahun 1908, dan mereka yang belajar di negeri Belanda mendirikan *Indische Vereniging* pada tahun yang sama (Kartodirdjo, 2001:115-124). Seperti di negara-negara jajahan yang lain, tumbuhnya kesadaran berbangsa dipengaruhi sedikitnya tiga faktor, yaitu pendidikan, bahasa rakyat (*vernacular*), dan media massa.

**Kesadaran
berbangsa**

Pertama, melalui pendidikan formal, pemerintah kolonial mengumpulkan pemuda-pemudi dari golongan elite dari berbagai suku, ras, dan daerah di Indonesia ke dalam satu tempat pendidikan, justru karena seleksi yang ketat dan tempat yang sangat dibatasi. Di sini para pelajar-mahasiswa bersama-sama mengembangkan kecerdasan, keahlian, rasa keindahan, dan pengetahuan yang memperluas cakrawala pandangan mereka. Melalui tahap ini pula di satu sisi mereka mulai melihat berbagai kepincangan masyarakat kolonial yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap golongan rakyat pribumi. Di sisi lain

**Faktor
kesadaran
berbangsa:
Pendidikan**

pelajar yang berbeda suku dan daerah menjadi semakin akrab. Mereka mulai mengidentifikasi diri sebagai sesama pribumi yang sama-sama merasakan keprihatinan atas ketidakadilan yang diderita rakyat.

Kedua, lewat pendidikan bahasa Melayu yang sudah dikenal sejak dahulu sebagai bahasa perantara antarsuku yang juga diajarkan di sekolah, di samping bahasa daerah masing-masing, sehingga sernakin populer digunakan orang banyak. Pemerintah sengaja membatasi penguasaan bahasa Belanda hanya pada golongan elit masyarakat yang berpendidikan Barat untuk menunjukkan superioritas budaya kolonial. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa birokrasi (*Dienst Maleisch*) di samping Bahasa Belanda, agar semua peraturan dan pengumuman pemerintah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Dengan semakin luasnya masyarakat pembaca mendorong timbulnya para pengarang yang menulis buku-buku dalam bahasa Melayu, baik novel, syair, atau esei dan pengetahuan populer, yang melahirkan kelompok sastrawan Pujangga Baru sejak tahun 1930-an. Mereka memiliki rasa kebangsaan Melayu yang tinggi yang terekspresi melalui tulisan-tulisan mereka. Bersama-sama dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional mereka memperjuangkan kemajuan dan kebebasan bagi rakyat pribumi (Anderson, 1983: 63-65, 106-107; Klooster, 1985: 58-64; Alfian, 1999: 467-480).

**Bahasa
Melayu**

Ketiga, perjuangan moderen tak dapat dipisahkan dengan peranan media massa. Meluasnya pendidikan dan popularitas penggunaan bahasa Melayu menjadi kesempatan yang baik untuk menerbitkan surat kabar sebagai alat propaganda dan mobilisasi. Melalui media massa kesadaran berbangsa, ide-ide perjuangan dan kritik-kritik kepada pemerintah disalurkan ke khalayak ramai dan membentuk opini masyarakat untuk mendukung perjuangan. Berbagai organisasi pergerakan nasional dan serikat buruh atau profesi mulai menerbitkan surat kabar atau majalah sejak dekade kedua abad XX, seperti *Sinar*

**Media
massa**

Hindia milik Sarekat Islam Semarang, *Oetoesan Hindia* organ Sarekat Islam Surabaya, *Fikiran Rakyat* milik PNI Bandung, *Hindia Baru* (Jakarta) dan *Boeroeh Bergerak* (Yogyakarta) (Yuliati, 2000; Ingleson, 1986). Melalui media massa ini pula semangat kebangsaan dan kesadaran berbangsa semakin dibangkitkan, dan semakin mempersatukan berbagai suku bangsa.

Hadirin yang mulia,

Berkat dukungan ketiga faktor tersebut kesadaran berbangsa yang ditumbuhkan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional sejak tahun 1908 semakin menjangkau kalangan yang lebih luas di lingkungan rakyat pribumi yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan keturunan, serta menyadarkan mereka akan pentingnya bersatu, bersama-sama berjuang untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan. Para pemuda-mahasiswa yang idealis dan militan, mulai dari Sutomo (*Budi Utomo*), Tjokroaminoto (*Sarekat Islam*), Hatta (*Indische Vereniging - Perhimpunan Indonesia*), Soekarno (*Algemene Studieclub Bandung - PNI*), Yamin (*Jong Sumatra*), Semadeni (*serikat buruh VSTP*), Misbach (*serikat tani Insulinde*), Marco (wartawan *Doenia Bergerak*), adalah contoh dari sekian banyak pemimpin yang mewakili segala lapisan dan golongan yang menggerakkan rakyat pribumi untuk mendukung perjuangan (Shiraishi, 1990).

Proses pembentukan dan persatuan bangsa mencapai satu tonggak simbolik yang menentukan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, ketika para pemuda yang mewakili berbagai suku bangsa bersepakat dan berikrar untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Bahkan rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia dari rakyat Aceh sudah lebih dulu dikemukakan oleh salah seorang tokoh Aceh Teuku Nya' Arief, anggota Volksraad, dalam pidatonya di bulan Juni 1928

Sejak waktu itu proses integrasi terus bergulir seiring dengan perjuangan menuntut pemerintahan sendiri dan kemerdekaan, meski mengalami tekanan dari pemerintah kolonial yang semakin represif terhadap gerakan radikal, sejak pemogokan besar-besaran yang dipelopori kaum Komunis pada tahun 1925/1926. Pemerintah bahkan melarang Partai Komunis Hindia, likuidasi PNI, dan pembuangan para pemimpin "radikal" ke luar Jawa (Kahin, 1961: 64-100; Ingleson, 1983: 266-315).

Hadirin yang mulia,

Keruntuhan negara kolonial Hindia Belanda pada Perang Dunia II (1942) oleh serbuan Jepang, dan pendudukan Hindia Belanda oleh Jepang merubah seluruh struktur politik di Hindia Belanda. Nama Indonesia secara resmi dipakai menggantikan nama wilayah Hindia Belanda, namun secara politik wilayah Indonesia dipecah menjadi tiga kekuasaan militer Jepang: Sumatera di bawah Angkatan Darat (Tentara Ke-25), Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat (Tentara Ke-16), sedang wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah Angkatan Laut (Armada Selatan Ke-2).

Meskipun di bawah kekuasaan Jepang Indonesia kembali dijajah, namun proses integrasi bangsa justru mencapai tonggak yang sangat penting, karena ikrar Sumpah Pemuda (satu nusa, satu bangsa, satu bahasa) secara faktual diakui oleh pemerintah militer Jepang, dengan tujuan agar rakyat mendukung peperangannya melawan Sekutu. Pelarangan bahasa Belanda (dan bahasa Sekutu yang lain) dan penggunaan bahasa Indonesia (dan bahasa Jepang) secara bebas melalui retorika para pemimpin dan media massa, semakin meningkatkan rasa kebangsaan dan persatuan. Meski di satu pihak Jepang melancarkan mobiliisasi massa rakyat (pembentukan Peta, Heiho, Seinendan, Keibodan, Romusha) guna mendukung keperluan perang, baik untuk kebutuhan sumberdaya manusia, maupun pengumpulan

bahan makanan dan sandang yang dituntut dari rakyat secara paksa, namun di pihak lain mobilisasi ini memberikan pengalaman partisipasi rakyat demi kepentingan negara, yang kelak akan sangat diperlukan negara bangsa (Kurasawa, 1987).

Hadirin yang terhormat ,

Berakhirnya Perang Dunia II dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri, bebas dari kekuasaan penjajah siapa pun. Momentum untuk menyatakan kemerdekaan kepada dunia diraih pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika terjadi *vacuum of legitimate power*, karena Jepang yang kalah tidak lagi sah memerintah, dan Sekutu yang menang belum lagi datang. Saat itu merupakan tonggak sejarah yang monumental bagi proses integrasi bangsa Indonesia. Secara yuridis formal bangsa Indonesia dikukuhkan menjadi satu *nation* pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara RI dengan dasar Pancasila yang digali oleh Soekarno, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dilengkapi dengan lambang Garuda Pancasila bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika” adalah perwujudan formal dari integrasi nasional Indonesia (Rahardjo, 2001:7-28). Ia merupakan *Imagined Community* yang dulu dicita-citakan oleh para pemuda yang berikrar pada tahun 1928, dan diidam-idamkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Soekarno, salah seorang Bapak Bangsa Indonesia, telah berjasa merumuskan nilai-nilai kepribadian bangsa ini menjadi dasar negara.

Kemerde-
kaan
Indonesia

Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berperan sebagai kultur normatif dan alat pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila akan menentukan orientasi tujuan serta sistem sosiopolitik pada tingkat makro dan menentukan kaidah-kaidah yang mendasari

pola kehidupan individual. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi faktor determinan bagi kehidupan moral berbangsa, tetapi juga memberikan landasan ideologis bagi pelbagai unsur dalam masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistis itu. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai yang menjadi komponen dari nasionalisme sebagai dasar untuk memperjuangkan realisasi dari integrasi nasional Indonesia (Kartodirdjo, 1990: 32-33).

Revolusi nasional yang terjadi antara tahun 1945 hingga 1949, dan penyatuan ke arah negara kesatuan RI tahun 1950 adalah batu ujian pertama apakah integrasi nasional yang telah kita deklarasikan menjadi realitas, atau masih merupakan masyarakat yang imajiner.

Hadirin yang mulia,

Melalui revolusi nasional bangsa Indonesia terbukti mampu mempertahankan baik kemerdekaan negara, kesatuan wilayah (kecuali Irian Barat yang baru terintegrasi tahun 1963), maupun kedaulatan pemerintah. Tantangan berat, selain mempertahankan kedaulatan negara dari penjajahan asing, adalah membangun baik integrasi vertikal (elit-masa) antara pemerintah dan rakyat di daerah, antara elit politik dan massa pengikut, maupun integrasi horizontal : penyatuan daerah-daerah ke dalam wilayah RI. dan hubungan antarsuku serta golongan.

*Integrasi
vertikal*

Berkaitan dengan integrasi vertikal, sangat menarik bahwa reaksi daerah terhadap proklamasi kemerdekaan dan berdirinya negara RI disambut positif pertama-tama justru oleh kelompok-kelompok lokal yang tergabung dalam organisasi lokal, ataupun yang memiliki jaringan dengan organisasi di pusat, bukan dari pemerintah lokal yang masih dalam situasi status quo dan menunggu. Pergerakan nasional yang tumbuh di Jakarta sebagai pusat kolonial telah mampu membangun jaringan dengan kelompok-kelompok progresif di daerah, menjadi faktor

penting sebagai penyalur ide-ide kemajuan dan semangat kebangsaan dengan membuka cabang di daerah. Di samping itu masyarakat lokal pun memiliki dinamika tersendiri dalam menanggapi arus kemajuan, baik melalui pendidikan swasta, madrasah atau pesantren, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang lain, di bawah pimpinan tokoh-tokoh lokal. Jaringan pusat-daerah ini semakin kokoh pada masa pendudukan Jepang, meskipun dengan membonceng kegiatan propaganda untuk memperoleh dukungan perang. Dinamika internal dan eksternal inilah yang membuat gaung kemerdekaan bergema di daerah, dan direspons secara positif, meskipun dengan intensitas yang berbeda.

Cukup mengambil contoh dua daerah di luar Jawa yang rawan disintegrasi, Aceh adalah satu-satunya daerah yang tidak diduduki Belanda pada masa revolusi (1945-1949). Hanya dua bulan setelah Proklamasi Aceh, telah membuat maklumat "berdiri di belakang maha pemimpin Soekarno" (bergabung dengan RI) yang ditandatangani oleh para pemimpin ularna Aceh, antara lain Tengku Daud Beureueh. Hal ini karena secara historis telah terbangun jaringan elit-massa antara pergerakan nasional yang berpusat di Jawa dengan di Aceh. Tak kurang dari *Sarekat Islam* membuka cabang pada tahun 1916, *Insulinde* pada tahun 1918, organisasi lokal *Sarekat Aceh* berdiri tahun 1918. Dari dinamika lokal sekolah-sekolah Islam formal moderen didirikan tahun 1919, sedang pemuda-pemuda Aceh dikirim ke sekolah Muhammadiyah di Jawa, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang progresif didirikan tahun 1939. Rakyat Aceh memberi dukungan sangat besar bagi eksistensi negara RI (Alfian, 1999:200-204).

Contoh terakhir adalah Irian Barat. Dari namanya yang terus berubah-ubah (hingga 1962 bernama Nieuw Guinea, 1963-1970 Irian Barat, 1970-1999 Irian Jaya, 1999 hingga kini Papua Barat) mencerminkan wilayah paling

ujung timur Indonesia ini menjadi ajang perebutan pengaruh politik. Pihak Indonesia menghendaki pengakuan kedaulatan kepada RI meliputi seluruh wilayah bekas *Nederlandsch Indie*, termasuk Irian Barat. Secara kebetulan kesadaran kebangsaan Indonesia telah tertanam sejak tahun 1944 pada tokoh-tokoh muda Irian Barat oleh tokoh-tokoh politik yang dibuang di Digul. Lewat para "kader" inilah tumbuh berbagai organisasi seperti Komite Indonesia Merdeka (KIM) dan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) dan tokoh-tokoh politik pro Indonesia, yang menjadi pendukung integrasi ke Indonesia. Bersama-sama bangsa Indonesia yang lain mereka berhasil membebaskan Irian Barat pada tahun 1962. Pihak Belanda yang tidak ingin menyerahkan Irian ke Indonesia, mempersiapkan sebuah negara Papua dengan membentuk aparat sipil dan militer, bahkan Dewan Papua. Namun sebelum itu terlaksana Irian Barat lebih dahulu berintegrasi ke Indonesia. Sementara itu sebagian besar penduduk Irian masih hidup dalam ikatan suku-suku yang sangat alamiah, terpencar-pencar tanpa sarana perhubungan moderen. Sebagian mereka yang terpelajar dan bekas pegawai Belanda ingin mendirikan negara Papua Barat. Maka sejak berintegrasi, rakyat Irian terbelah menjadi tiga kelompok kesetiaan: setia kepada RI, setia kepada *imagined community* negara Papua, atau setia kepada suku masing-masing (Kaisiepo, 1993; Adicondro, 1993; Sjamsuddin, 1989). Dari contoh-contoh di atas tampak bahwa proses integrasi nasional Indonesia pada batu ujian pertama cukup berhasil.

Hadirin yang mulia,

Selain integrasi vertikal, integrasi horizontal, dalam hal ini integrasi antargolongan atau kelas masyarakat perlu kita cermati. Revolusi ternyata juga memakan anak sendiri. Perubahan sosial yang mendadak, berskala luas dan berjangka lama telah mengguncang struktur masyarakat lama. Revolusi nasional yang berdimensi politik di beberapa daerah menjalar ke revolusi sosial, konflik antar-

*Integrasi
horizontal*

golongan dan antarkelas masyarakat yang tajam dan berdarah.

Di Aceh persaingan pengaruh dan kekuasaan antara ulama (pemimpin agama dan moral) dan *uleebalang* (pemimpin daerah dan adat) memuncak pada masa revolusi. Tuduhan bahwa *uleebalang* setelah perang Aceh memihak Belanda karena diangkat menjadi kepala daerah, menyimpan rasa dendam di kalangan ulama reformis, apalagi ketika ternyata *uleebalang* diangkat menjadi kepala daerah oleh pemerintah RI. Dalam situasi *vacum of power* pada akhir tahun 1945 hingga tiga bulan awal 1946 konflik berdarah tak terelakkan antara laskar pemuda, pendukung penuh ulama melawan para *uleebalang* dan pejabat pemerintah, yang berakhir dengan kekalahan total pihak *uleebalang*. Sejak itu pemerintahan RI dipegang oleh golongan ulama atas pilihan rakyat (Morris, 1985:90-98).

**Revolusi
Sosial**

Revolusi sosial juga terjadi di beberapa daerah lain, dengan kelompok-kelompok yang berbeda dan faktor-faktor penyebab yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama: mengubah struktur kekuasaan feodalistik tradisional menjadi demokratik. Di daerah Tegal, Pemalang, dan Pekalongan terjadi penculikan dan pembunuhan para pamong praja, dari bupati hingga kepala-kepala desa oleh pemuda. Para pamong praja ini dituduh sebagai pengikut Belanda dan kolaborator Jepang, dua penjajah asing yang membawa kesengsaraan kepada rakyat petani melalui eksploitasi ekonomi, yaitu eksploitasi tanah dan tenaga kerja petani oleh pabrik-pabrik gula. Pada masa kolonial ketiga daerah tersebut memang merupakan konsentrasi pabrik gula yang menyewa tanah-sawah petani. Pada masa Jepang kembali petani disengsarakan oleh tuntutan penyerahan padi besar-besaran untuk logistik perang, dan pengerahan tenaga kerja untuk pembangunan prasarana (*romusha*), yang menyebabkan kelaparan dan kematian. Semua "dosa-dosa" ini ditimpakan kepada pamong praja hingga kepala desa, karena

merekalah yang memerintahkannya. Aksi perburuan, penculikan, pembunuhan, dan penggantian oknum-oknum pamong praja dilakukan oleh para pemuda di bawah pimpinan tokoh-tokoh Komunis dan Islam pada bulan Oktober 1945 hingga Desember 1945. Para pemuda kemudian mengangkat pemimpin-pemimpin mereka menjadi kepala daerah (bupati Brebes dan Tegal), dan memilih tokoh-tokoh lain (dari partai Masyumi dan PNI) yang mereka anggap populis menjadi pamong praja yang baru, dan mengganti para lurah dengan orang-orang yang dianggap bersih. Gerakan revolusi sosial ini baru dapat dihentikan ketika TKR sebagai aparat keamanan pemerintah, bersama-sama dengan kelompok Islam yang lain melakukan operasi pemulihan keamanan. Namun demikian, sebagian besar para kepala daerah dan pamong praja pilihan rakyat tetap dipertahankan. Ini menandakan terjadinya perubahan ke arah demokratisasi di bidang birokrasi daerah, sebagai buah dari revolusi, dengan cara revolusioner pula. (Lukas, 1989; Lukas, 1985: 23-46).

Sumatera Timur adalah contoh revolusi sosial yang menumbangkan penguasa tradisional lama (sultan) oleh rakyat, dalam kaitan dengan kesetiaan kepada negara RI yang baru. Sumatera Timur yang sejak tahun 1870 menjadi ajang eksploitasi oleh perkebunan swasta asing, yang beraliansi dengan raja-raja Melayu (terdapat 19 kerajaan dan 4 kedadukan, yang terkenal adalah Kesultanan Langkat, Deli, Serdang, dan Asahan). Beberapa kerajaan yang memiliki tanah-tanah yang disewakan untuk perkebunan menikmati kekayaan, yang sangat kontras dengan kehidupan kuli-kuli perkebunan yang dikontrak dari Jawa. Di daerah ini telah terjalin jaringan politik dengan pusat di Jawa, antara lain *Budi Utomo* (1908), *Sarekat Islam* (1919), dan *Insulinde* (1919). Melalui organisasi-organisasi ini ditanamkan semangat perjuangan kepada penduduk, khususnya suku Batak, penduduk pendatang Jawa, dan Minangkabau. Tujuan perjuangan adalah melawan kekuasaan kolonial, melawan kekuasaan

kapitalis perkebunan, dan melawan para raja atau bangsawan yang dituduh bekerjasama dengan kolonial (karena menandatangani "surat takluk") dan kapitalis, di samping menanamkan kesadaran kebangsaan Indonesia. Semangat perjuangan semakin radikal dengan masuknya PKI dan organisasi Islam Sumatra Tawalib dalam gerakan protes mereka, dan baru mereda setelah PKI dibubarkan tahun 1927, digantikan oleh organisasi yang lebih moderat seperti PNI, Gerindo, Muhammadiyah, dan organisasi lokal Persatuan Kristen Batak.

Persiapan masyarakat ke arah radikalisasi setelah proklamasi kemerdekaan 1945, dan kontradiksi masyarakat antara elit tradisional dan massa rakyat meniscayakan meletusnya revolusi sosial pada bulan Maret 1946. Para laskar pemuda melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap para raja atau bangsawan, keluarga mereka, dan para pejabat kerajaan, di samping penjarahan harta benda, dan pendudukan tanah-tanah perkebunan. Gerakan ini juga merupakan konflik antar etnik, yaitu pemuda suku Jawa dan Batak menyerang suku Melayu, karena mereka adalah kawula raja Melayu yang pro Belanda, sedang pemuda-pemuda suku Simalungun dan Karo menyerang elit bangsawan sesama suku mereka sendiri, karena dianggap menindas rakyatnya. Juga yang selalu jadi korban adalah kelompok etnis Cina yang menguasai kehidupan ekonomi. Sebagai pembalasan, golongan bangsawan Melayu bersama suku mereka dan golongan etnis Cina mencari bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda yang kembali menduduki Sumatera pada bulan April 1946. Mereka menjadi penentang negara RI dan pendukung Negara Sumatera Timur ciptaan Belanda yang didirikan tahun 1948. Namun kekuatan rakyat pro RI ternyata lebih besar. Negara Sumatera Timur harus dihapuskan menjelang 17 Agustus 1950 berdasarkan tuntutan sebagian besar rakyatnya (Langenberg, 1985: 113-137; Sinar, 1995).

Hadirin yang mulia,

Melalui pengalaman revolusi nasional bangsa Indonesia dapat mencapai integrasi politik secara vertikal, sementara melalui revolusi sosial telah terjadi proses integrasi sosial, meski harus melalui konflik berdarah. Sebagai batu ujian pertama bisa dikatakan bahwa hingga tahun 1950 bangsa Indonesia telah lulus ujian dengan baik.

Pertanyaan kedua adalah sejauh mana integrasi nasional ini dapat dipertahankan, bahkan diperkembangkan?

Pada hakikatnya faktor utama keberhasilan integrasi nasional tahun 1950 adalah karena kesamaan tujuan, yaitu membebaskan diri dari penjajahan dan kesamaan cita-cita untuk membangun masyarakat baru yang lebih sejahtera. Untuk itu semua suku dan golongan bersedia menyatukan persamaan-persamaan dan melupakan perbedaan-perbedaan. Dengan kata lain faktor *tunggal ika* lebih dikedepankan daripada faktor *bhinneka*. Ketika integrasi nasional tercapai dan bangsa Indonesia akan membangun masyarakat baru, terjadi persaingan antara kekuatan-kekuatan persatuan (*tunggal ika*) yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan perbedaan (*bhinneka*). Artinya, kepentingan bangsa sebagai keseluruhan, yang diwakili pemerintah Pusat, berhadapan dengan kepentingan subbangsa di daerah, dengan kekhususan dan identitas masing-masing. Dialog antara "Pusat" dan "Daerah" ternyata tidak selalu berjalan lancar. Konsekuensi sebagai satu negara kesatuan meniscayakan demi kesatuan dan persatuan bangsa dialog harus dimenangkan oleh pusat, *at all costs*. Masalah-masalah daerah dan kecenderungan sentrifugal yang membawa konflik pusat dan daerah seringkali terpaksa diselesaikan dengan kekuatan senjata, karena kita terlanjur memiliki tradisi kekerasan dalam menyelesaikan masalah daripada melalui dialog dan perundingan untuk mencapai kesepakatan, seperti pada

contoh konflik-konflik berikut. Lebih celaka karena pemerintah Pusat yang berada di Jawa lebih banyak diwakili oleh suku Jawa yang memang mayoritas dalam jumlah penduduk, sehingga konflik Pusat - Daerah berimbas menjadi konflik suku Jawa – non Jawa.

Hadirin yang mulia,

Beberapa peristiwa konflik antara daerah dan pusat menunjukkan adanya dialog-dialog yang berakhir dengan jalan buntu. Peristiwa proklamasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang tahun 1958, dan proklamasi Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) di Makasar tahun 1957 adalah contoh gerakan daerah yang bersumber pada konflik daerah dengan pusat. Pada intinya ada tiga faktor penyebabnya, yaitu pertama, masalah Pusat: ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah Pusat yang “bersahabat” dengan PKI dan tidak mendukung Presiden Sukarno menerapkan sistem presidensiil. Kedua, pemerintah mengabaikan pembangunan dan ekonomi daerah, dan ketiga, keinginan untuk menerapkan “dwifungsi” ABRI, karena pemerintahan partai-partai politik hanya terfokus kepada persaingan partai menduduki pemerintahan. Kebuntuan dialog yang didasari prasangka buruk terpaksa berakhir dengan kekerasan senjata, yang meninggalkan luka menyakitkan pada rakyat di daerah yang dikalahkan. Pemberontakan semacam ini pada umumnya didukung oleh partai atau organisasi tertentu dalam jaringan elit dan massa di pusat dan di daerah yang semakin mempertajam konflik politik (Leirissa, 1999; Harvey, 1983; Sjamsuddin, 1989: 49-69).

*Konflik
pusat -
daerah*

Konflik jenis lain adalah konflik ideologi yang diwakili oleh pemberontakan Darul Islam sejak tahun 1949-1962, dan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pada dasarnya kedua peristiwa tersebut bertujuan mendirikan negara dengan dasar ideologi yang berbeda dengan dasar negara RI Pancasila. Dalam hal ini jelas tidak bisa ditolerir oleh pemerintah dan harus ditolak (Kahin, 1961:290-300).

Konflik besar yang berdampak sangat luas dalam Sejarah Indonesia adalah peristiwa G-30 S pada tahun 1965. Peristiwa yang bermula dari pembunuhan enam jenderal teras TNI Angkatan Darat (dan seorang perwira) oleh sekelompok tentara yang bekerjasama dengan PKI telah membawa perubahan politik yang sangat drastis. Pembunuhan yang berawal dari perseteruan antara Angkatan Darat yang anti-Komunis dengan PKI itu berakhir dengan turunnya Presiden Sukarno, pergantian kekuasaan dengan naiknya militer ke dalam pemerintahan, pembubaran PKI dan pembunuhan terbesar di Indonesia terhadap anggota-anggota PKI dan organisasi-organisasi *onderbouw*-nya. Kejadian ini mewariskan trauma bangsa yang sangat menyakitkan (Sundhaussen, 1985).

**Peristiwa
G-30 S**

Gerakan paling mutakhir dan bersifat separatis adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aceh merupakan sebuah *sad story* dari sebagian rakyat di satu daerah yang dilanda kekecewaan berkepanjangan kepada Negara RI. Dimulai dengan satu simpati yang luar biasa terhadap berdirinya negara RI, rakyat Aceh langsung bergabung dan memberikan apa saja yang dibutuhkan negara RI. Tidak kurang dari dua pesawat terbang komersial telah disumbangkan kepada pemerintah pada tahun 1947, sejumlah dana, dan tanah Aceh sebagai *air base* untuk penerbangan ke luar negeri untuk mencari dukungan politik di dunia internasional. Pada tahun 1949 setelah pemerintahan RI dipindahkan ke Sumatera, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), di bawah tekanan pendudukan Belanda yang menduduki sebagian besar pulau Sumatera, mengangkat dua orang Gubernur Militer, salah satunya adalah Teungku Daud Beureueh untuk Daerah Militer Istimewa Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, kemudian dibentuk propinsi Aceh dengan Gubernur Teungku Daud Beureueh. Sayang sekali konstitusi RIS sesuai dengan perjanjian RIS-RI tidak memasukkan Aceh sebagai satu propinsi, melainkan hanya sebagai

**Gerakan
separatis**

keresidenan. Kekecewaan ini menyebabkan Daud Beureueh tahun 1953 memproklamkan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia yang didirikan Kartosuwiryo, mengingat Aceh memiliki warisan dan identitas Islam yang sangat kental. Untuk menghargai jasa rakyat Aceh pemerintah kemudian menetapkan Aceh sebagai Propinsi Daerah Istimewa pada tahun 1959, namun seorang Hasan Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976, dengan propaganda anti Jawa mengajak rakyat mendirikan Gerakan Aceh Merdeka. Dengan teror yang dilakukannya menjadikan Aceh Daerah Operasi Militer (DOM) dan korban pun banyak berjatuhan (Sjamsuddin, 1989: 70-89; Alfian, 1999: 239-246).

OPM adalah warisan sejarah yang harus dijalani rakyat Papua Barat. Suku bangsa yang memiliki ciri budaya khas Melanesia, yang hidup dalam struktur masyarakat sub suku yang sangat kental, dan mayoritas beragama Kristen dan Katolik ini menunjukkan identitas budaya yang unik. Sejak awal telah menjadi daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda yang masing-masing menanamkan pengaruhnya, hingga sebagian rakyat memilih prointegrasi dan sebagian antiintegrasi. OPM sebagai kelompok antiintegrasi semakin mendapat kesempatan berkembang ketika perkembangan sosial ekonomi Papua lebih berpihak kepada rakyat pendatang, baik kesempatan memasuki jajaran birokrasi, maupun kesempatan-kesempatan dalam membangun ekonomi. Konsesi perusahaan multinasional (tambang tembaga Freeport) hampir tidak menyentuh kemakmuran rakyat Papua, bahkan merusak lingkungan mereka, sementara kekayaan mengalir ke pusat. Baik gangguan keamanan OPM maupun protes-protes murni rakyat lebih diselesaikan dengan pendekatan kekerasan, menyebabkan OPM semakin mendapat tempat di kalangan rakyat. Satu faktor adalah bantuan asing yang mendukung gerakan itu, baik di Australia, Negeri Belanda, bahkan di

Afrika (Senegal), semakin menyulitkan pemerintah pusat untuk mengatasinya.

Sejak tahun 1988 kelompok OPM memproklamasikan "Negara Melanesia Barat" dan menaikkan bendera Bintang Kejora meskipun hanya dihadiri oleh 60 orang. Setiap tahun jumlah yang menghadiri upacara "proklamasi" ini bertambah banyak yang semakin meningkatkan bahaya disintegrasi. Dan peristiwa terakhir adalah kematian misterius Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua yang sangat kharismatis pada bulan November 2001.

Hadirin yang terhormat,

Kerawanan disintegrasi juga menampakkan diri pada aspek sosial dan budaya, khususnya sejak masa Reformasi 1997. Diawali dengan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa menentang rezim Orde Baru yang murni bersifat politis pada tahun 1997 dan berakhir dengan tumbanganya Orde baru, timbul gerakan massa lain yang membuat kerusuhan-kerusuhan di kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dengan sasaran utama etnis Cina para perusuh membakar dan menjarah toko-toko dan gedung-gedung megah yang menjadi simbol kekayaan dan arogansi etnis ini, yang meridapat kesempatan ekonomis melalui kolusi antara pengusaha-pengusaha pada masa Orde Baru, bahkan melakukan perkosaan dan pembunuhan.

Disintegrasi sosial, ekonomi, dan budaya

Kerusuhan-kerusuhan merambah ke berbagai kota kecil dan desa-desa, di Jawa dan luar Jawa dengan spektrum sosial budaya yang lebih luas. Sasaran berkembang menjadi konflik antarumat beragama, antarsuku (suku asli dan suku pendatang), antarburuh dan majikan, antara rakyat dan aparat keamanan. Bahkan terjadi berbagai demonstrasi menentang pejabat tertentu yang dinilai korup dan main kuasa, sehingga massa rakyat menuntut pejabat yang bersangkutan untuk diberhentikan.

Gerakan ini menimpa nasib pejabat dari tingkat gubernur hingga kepala desa. Sejak runtuhnya Orde Baru, aparat keamanan yang dituduh sebagai alat represi penguasa terhadap rakyat menjadi tidak berwibawa dan kurang tegas dalam mengatasi kerusuhan dan memelihara keamanan. Seiring dengan kehidupan ekonomi yang semakin sulit kejahatan semakin merebak, dan masyarakat semakin beringas menghajar para pencuri yang tertangkap. Situasi anomali ini mulai berangsur normal di awal tahun 2000, awal abad XXI, ketika Megawati menjadi presiden RI kelima, dengan dukungan partai-partai di DPR, namun kerusuhan di beberapa daerah sesekali masih juga meletup, seperti di Ambon, Poso, dan Kalimantan Tengah, dan Aceh bahkan sampai saat ini.

Hadirin yang mulia,

Konflik-konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, atau pertentangan ideologi antara negara dan warga negara yang berlanjut dengan keinginan mendirikan satu negara hampir selalu didukung oleh organisasi politik tertentu yang memiliki jaringan di daerah-daerah, hingga memiliki kekuatan dan daya bertahan yang cukup liat. Hal ini menyebabkan pemerintah cukup sulit untuk memulihkan hubungan vertikal dengan rakyat di daerah atau kelompok-kelompok ideologis setelah tindakan kearnanan terpaksa dilakukan.

Tidak berbeda dengan konflik vertikal, konflik horizontal antarsuku atau antargolongan, khususnya golongan umat beragama seringkali juga memiliki hubungan atau jaringan vertikal dengan organisasi atau kelompok-kelompok di tingkat pusat. Di samping organisasi-organisasi politik atau sosial yang resmi, larangan mendirikan partai politik pada masa Orde Baru (selain tiga partai yang diizinkan) mendorong tumbuhnya ratusan, bahkan ribuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian menolong dan mendampingi rakyat

kecil dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Kelompok LSM ini dapat bergabung dengan golongan yang bertikai, yang dapat membantu penyelesaian pertikaian, atau memperuncing pertikaian.

Berkaitan dengan semakin terbukanya semua negara oleh arus globalisasi dan kecanggihan komunikasi elektronik meniscayakan tersiarnya segala kejadian di dunia untuk diketahui oleh seluruh dunia (Naisbitt, 1990:298-307), masuk pula jaringan internasional dan kelompok-kelompok asing, bantuan-bantuan asing, baik resmi atau tidak resmi ke Indonesia. Mereka dapat membantu meredakan pertikaian atau pemberontakan, namun dapat pula justru memicunya, tergantung kepada siapa mereka bersimpati.

Seluruh pengalaman sejarah bangsa yang telah dipaparkan di atas menjadi sebab melemahnya integrasi nasional pada awal abad ini, baik dalam dimensi vertikal, maupun dimensi horisental.

Hadirin yang mulia,

Demikianlah proses integrasi nasional bangsa Indonesia telah dipaparkan dalam dimensi sejarah, sebuah jawaban yang sangat panjang atas pertanyaan "apa yang terjadi dengan proses integrasi nasional kita". Inti historis jawabnya adalah bahwa kita telah membangun suatu bangsa dan mencapai integrasi nasional. Namun banyak harapan tidak terwujud pada sebagian bangsa ini, hingga melakukan langkah berbeda arah dengan tujuan umum bangsa yang melemahkan integrasi. Harus diakui bahwa kita masih menyimpan banyak masalah yang harus diselesaikan, dan kita meninggalkan luka-luka yang masih menyakitkan pada diri kita sebagai bangsa yang harus kita sembuhkan.

Simpulan

Masalah pertama adalah membangun kembali integrasi vertikal antara pusat dan daerah, antara elite dan

massa yang mengalami distorsi. Itu berarti membangun kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Berarti pula suatu tuntutan membangun pemerintah pusat yang solid, didukung penuh oleh elit dan massa, yang demokratis dan mampu mengupayakan perimbangan kekuasaan baik politik maupun ekonomi antara pusat dan daerah, antara elit dan massa. Kedua, perlunya mengupayakan penyembuhan bagi luka-luka bangsa atas kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah atas nama negara. Ketiga, membangun integrasi horizontal di bidang sosial budaya dengan mengakui kebhinekaan bangsa dan membangun hidup berdampingan secara damai. Kebhinekaan adalah kekuatan untuk menyumbangkan milik terbaik dari masing-masing yang berbhineka itu untuk yang ika : Indonesia. Keempat, kita masih menyisakan masalah mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: menyempurnakan Undang-undang Dasar RI 1945. Masalah besar ini harus diselesaikan melalui dialog, diskusi, studi, yang intensif dan berkelanjutan, hingga mencapai kompromi, demi kompromi, selangkah demi selangkah, namun tidak dilakukan dengan suara gemuruh, tindakan radikal yang mengguncang kehidupan masyarakat.

Hadirin yang saya muliakan,

Perkenankanlah saya menyampaikan pesan kepada para mahasiswa tercinta, termasuk juga mahasiswa Fakultas sastra Jurusan Sejarah. Anda adalah generasi penerus bangsa dari golongan elit terpelajar, yang memiliki ilmu pengetahuan, kearifan intelektual, dan kepekaan sosial. Dengan membaca sejarah anda mengetahui bahwa golongan terpelajar adalah pelopor perubahan, pembawa ide kemajuan dan pembaharuan, dan motor penggerak perjuangan bangsa. Perjuangan anda menjadi berbobot berkat proses belajar dan berdialog dengan masyarakat. Maka teruslah anda membaca, menganalisis, menulis dan berdialog, agar "tugas sejarah" anda dapat anda laksanakan dengan baik.

*Harapan
dan pesan
kepada
mahasiswa
dan
dosen
muda*

Kepada rekan-rekan dosen muda, khususnya dosen sejarah, marilah kita meneliti dan menulis sejarah, di samping mengajar sejarah, agar semakin banyak “kebenaran” dapat disingkapkan mengenai peristiwa masa lalu yang kini sering dipertanyakan. Dengan menggunakan kaidah keilmuan, dapat dicapai penulisan sejarah yang seimbang, karena pada hakikatnya kebenaran sejarah bersifat intersubyektif.

Hadirin yang saya muliakan,

Untuk mengakhiri pidato ini izinkanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional yang telah mengangkat saya sebagai Guru Besar dalam Ilmu Sejarah. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor/ Ketua Senat, Sekretaris Senat Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan sebagai Guru Besar di Fakultas Sastra.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu Dekan/Ketua Senat Prof. Dr. Th. Rahayu Prihatmi, seluruh anggota Senat, teman-teman staf pengajar dan staf administrasi di lingkungan Fakultas Sastra, yang telah mendorong semangat saya, dan membantu sejak awal pengusulan ke jenjang Guru Besar hingga keluarnya Surat Keputusan Menteri, dan para dekan sebelumnya Drs. H. Anhari Basuki, SU., Prof. Dr. Hj. Istiati Soetomo, Prof. Drs. Sujarwo, dan Prof. Slamet Rahardjo, MA yang telah menerima saya sebagai tenaga pengajar di Fakultas Sastra.

Khusus kepada para sejawat dosen Jurusan Sejarah yang saya cintai, terima kasih tak terhingga saya sampaikan atas segala perhatian, pengertian, saran, dan bantuan Anda yang tulus, untuk membantu mempersiapkan segala sesuatu, hingga saya dapat mencapai jenjang

jabatan guru besar. Tak lupa, ucapan terima kasih juga saya sampaikan dalam doa, kepada teman sejawat saya yang telah berpulang, yaitu Alm. Prof. Dr. Hamid Abdullah, dan Alm. Drs. Moehadi. Semoga Tuhan berkenan memberi tempat yang layak di sisiNya.

Hadirin yang saya hormati,

Secara khusus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Prof. Ir. Eko Budihardjo yang terus mendorong saya untuk mengajukan usulan guru besar, dan kepada Bapak Prof. Ir. Joetata Hadihardaja, yang membantu memperjuangkan pengusulan guru besar saya (hingga keluarnya Surat Keputusan Pengangkatan Guru Besar). Demikian pula saya sampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Prof. Drs. Sudjati, yang tak jemu-jemu mengingatkan dan memacu saya agar mengusulkan kenaikan jenjang jabatan tertinggi sebagai pendidik. Tak terkecuali terima kasih saya sampaikan kepada *peer group* yang diketuai Prof. dr. Soebowo, Sp.PA atas berbagai sarannya

Secara istimewa saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang mendidik saya Sekolah Dasar di Perguruan Taman Siswa di Cepu, Jakarta, dan Pematang Siantar, yang memperkenalkan pelajaran sejarah pertama kali dengan sangat menarik. Demikian pula ucapan terima kasih saya sampaikan kepada guru-guru saya di SMP Santa Ursula, Jakarta, khususnya Ibu Sulastri Sunoto, yang masih bisa hadir di ruangan ini. Tak lupa pula terima kasih saya sampaikan kepada para guru saya di SMA Santa Ursula Jakarta. Seorang di antaranya kemudian menjadi mahaguru di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, dan menjadi promotor saya dalam penulisan disertasi, yaitu Prof. Dr. A. Sartono Kariodirdjo. Kepada beliau saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga.

Kepada para dosen pembimbing saya dalam ilmu sejarah yang lain di Fakultas Sastra UGM, yaitu Drs.

Benny Utoyo almarhum, Drs. Soeri Soeroto, MA, dan mereka yang membimbing saya ke program doktor, yaitu Prof. Dr. H.Teuku Ibrahim Alfian, MA, Prof. Dr. Djoko Suryo, Prof. Dr. Soedarsono, MA, dan Prof. Dr. Loekman Soetrisno almarhum, saya sampaikan terima kasih yang mendalam. Kepada mereka yang telah wafat, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka, dan menerima mereka dalam kedamaian abadi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pembimbing ketika saya studi di Negeri Belanda dalam rangka penulisan disertasi, yaitu Prof. Dr. C. Fasseur (Rijksuniversiteit Leiden), Prof. Dr. P.W Klein dan Prof. Dr. Jan Breman (Erasmus Univ. Rotterdam), dan Prof. Dr. Peter Boomgaard (KITLV).

Pada kesempatan ini pula, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Masrun, MA dari Lembaga Pendidikan Doktor UGM, yang telah menerima saya sebagai mahasiswa program doktor. Ini dimungkinkan berkat izin yang diberikan kepada saya untuk meninggalkan tugas mengajar dan mengikuti program doktor oleh mantan Rektor Universitas Diponegoro Alm. Prof. Sudarto, S.H. Kesempatan menyelesaikan program doktor diberikan oleh mantan Rektor Universitas Diponegoro Prof. dr. Moeljono S.Trastotenojo. Demikian pula mantan rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Muladi, S.H telah mendukung studi sejarah maritim di Universitas Diponegoro, yang dilanjutkan oleh Rektor Prof. Ir. Eko Budihardjo, yang telah meresmikan Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara, di bawah Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. Kepada mereka semua saya sampaikan terima kasih.

Kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro tempat saya bekerja di Pusat Penelitian Sosial Budaya, baik Ketua yang terdahulu: Prof. Dr. dr. Satoto maupun ketua yang sekarang: Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, saya sampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin

lembaga ini. Demikian pula kepada rekan-rekan peneliti yang tergabung dengan Pusat Penelitian Sosial Budaya , saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya dalam melaksanakan penelitian dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Panitia dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas segala bantuannya sejak dari proses pengusulan guru besar hingga terlaksaniannya pengukuhan.

Tak lupa saya sampaikan terimakasih secara khusus kepada Bapak Supeno, pengemudi yang selalu siap mengantar dan membantu saya dalam melaksanakan tugas, kapan saja, dan kemana saja.

Hadirin yang mulia,

Akhimya kepada almarhum ayah kandung saya: Malikus Sastroatmodjo dan Ibu kandung saya: Almarhum Siti Mandaliyah, sujud dan terima kasih saya haturkan, karena melalui merekalah Tuhan memberikan hidup kepada saya. Teriring doa semoga Tuhan memberikan kedamaian dan kebahagiaan abadi. Sembah dan sujud saya dan terima kasih yang tak terhingga kepada paman dan ayah angkatku: dr. Antonius Suroyo. Bersama Ignatia Bandisah, ibu angkatku, mereka adalah orang tuaku yang sesungguhnya, yang mendidik saya dan saudara-saudara saya tentang apa artinya cinta, secara nyata. Kepada Ibu Bandisah yang kini berusia 85 tahun, saya haturkan terima kasih, atas kesetiaan dan kesabaran, dengan cinta yang tak pernah putus, hingga saya dapat berdiri di depan sidang yang mulia ini. Semoga Tuhan memberikan pengampunan kepada almarhum Bapak Suroyo dan menganugerahkan kebahagiaan kekal di surga.

Kepada semua saudaraku, baik saudara kandung maupun saudara angkat, seluruh keluarga besar Suroyo,

saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kesabaran anda kepadaku. Marilah kita pelihara ikatan cinta yang diwariskan oleh Bapak kepada kita.

Sebagai penutup pidato pengukuhan saya, ingin saya mengingatkan hadirin bahwa universitas ini menyanggah nama seorang pahlawan : Diponegoro. Selain seorang pejuang, beliau adalah seorang sastrawan dan sejarawan, yang menulis *Babad Dipanegara*. Betapa keprihatinan beliau kepada nasib rakyat dan negara, yang mendasari perlawanannya terhadap penjajah, antara lain terlukis dalam tembang *Kinanthi pupuh 29* :

*Ing mangke katingal sampun
Risak manahing wong cilik
Wong agung galihe rangka
Ewah adating nagari
Pradata Surambi nora
Ngadeg miwah kukum adil.*

(kini telah nampak
kerisauan hati rakyat kecil
para pembesar hatinya kacau
adat negeri telah diubah
pengadilan dan *Surambi* tidak ditegakkan
dan hukum tidak adil).

Kiranya kita bisa mewarisi keprihatinan beliau dan melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung : Satya Historika.
- Aditjondro, G.J., 1993. "Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam Penggelapan Nasionalisme Orang Irian dalam Historiografi Indonesia", dalam *Seminar Nasionalisme Indonesia pada dan Menjelang Abad XXI*, Bina Dharma, Salatiga.
- Alfian, Teuku Haji Ibrahim, 1999. "Bahasa Melayu sebagai Faktor Dinamika Pertumbuhan Budaya Bangsa", dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary, eds. *Panggung Sejarah : Persembahan kepada Profesor Dr. Denys Lombard*. Jakarta : Ecole Francaise d'Extreme-Orient/Pusat Penelitian Arkeologi Nasional/Yayasan Obor Indonesia, hal. 467-480.
- Alfian, Teuku Ibrahim, 1999. *Wajah Aceh dalam lintasan Sejarah*. Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Anderson, Benedict, 1985 (1983). *Imagined Communities, Reflections on the Original Spread of Nationalism*. London : Verso Edition.
- Drake, Christine, 1985. *National Integration in Indonesia. Pattern and Policy*. Honolulu : University of Hawaii Press.
- Gonggong, Anhar, 1993. "Persepsi Mengenai Nasionalisme dalam Pembangunan pada Masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan", dalam *Seminar Nasionalisme Indonesia pada dan Menjelang Abad XXI*, Bina Dharma, Salatiga.
- Hall, Kenneth R., 1985. *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu : University of Hawaii Press.
- Hardjana, Andre A., 1993. "Persepsi Mengenai Nasionalisme dalam Pembangunan pada Masyarakat Jawa", dalam *Seminar*

Nasionalisme Indonesia pada dan Menjelang Abad XXI, Bina Dharma, Salatiga.

Harvey, Barbara Sillars, 1983. *Permesta. Pemberontakan Setengah hati*. Jakarta: Grafiti.

Houben, Vincent. J.H., 1992. "Java and the Java Sea. Historical Perspectives", dalam V.J.H. Houben, H.M.J. Maier and W. van der Molen (eds.) *Looking in Odd Mirrors : The Java Sea*. Semaian 5. Leider. : Vakgroep Talen en Cultuuren van Zuidoost-Azie en Oceanie, Rijksuniversiteit, hal. 212-240.

Ingleson, John, 1986. *In Search of Justice. Workers and Unions in Colonial Java, 1908-1926*. Singapore : Oxford University Press.

Kahin, Audrey, 1985. *Regional Dynamics of the Indonesia Revolution*. Honolulu : University of Hawaii Press.

Kahin, George Mc Tuman, 1961. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca/New York : Cornell University Press.

Kaisiepo, Manuel, 1993. "Ke-Irian-an dan Ke-Indonesiaan : Mengkaji Nasionalisme dalam Konteks Lokal", dalam *Seminar Nasionalisme Indonesia pada dan Menjelang Abad XXI*, Yayasan Bina Dharma, Salatiga.

Kartodirdjo, Sartono, 1993. "Nasionalisme Lampau dan Kini", dalam *Seminar Nasionalisme Indonesia pada dan Menjelang Abad XXI*, Bina Dharma, Salatiga.

Kartodirdjo, Sartono 2001 *Indonesian Historiography*. Yogyakarta: Kanisius.

Kartodirdjo, Sartono, 1973. *Protest Movements in Rural Java. A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Singapore/Kuala Lumpur/Jakarta: Oxford University Press.

- Kartodirdjo, Sartono, 1990. *Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Kartodirdjo, Sartono, 1998 (1984). A. *Modern Indonesia. Tradition and Transformation*. Yogyakarta : Gajah Mada Univ. Press.
- Klooster, H.A.J., 1985. *Indonesiers Schrijven Hun Geschiedenis*. Disertasi. Leiden : Verhandeligen, KITLV.
- Koentjaraningrat, 1971. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djakarta : Djambatan.
- Kohn, Hans, 1955. *Nasionalisme, Arti dan Sejarah*. Jakarta : Erlangga, 1984 (1955). Judul asli : *Nationalism. Its Meaning and History*. Princenton : Nostrand Company.
- Kurasawa, Aiko, 1993, 1987. *Mobilisasi dan Kontrol*, Studi Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945, terjemahan Hermawan Sulisty. Jakarta : Yayasan Kartasarana/GRASINDO.
- Langenberg, Michael van, 1985. "East Sumatra: Accommodating an Indonesian Nation Within A Sumatran Residency, dalam Audrey R. Kahin, ed. *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution Unity from Diversity*. Honolulu: University of Hawaii Press, hal. 113-137.
- Lapian, A.B., 1992. *Sejarah Nusantara Sejarah Bahari*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia.
- Lapian, Andrian B., 1999. "Nusantara : Silang Bahari", dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary, eds., *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Profesor Dr. Denys Lombard*. Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient/Pusat Penelitian Arkeologi Nasional/Yayasan Obor Indonesia, hal. 79-92.
- Leirissa, R.Z., 1991. *PRRI. PERMESTA*. Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis. Jakarta: Grafiti.

- Leirissa, R.Z., 1993. "Nasionalisme dan Posisi Daerah : Kasus Minahasa" dalam *Seminar Nasionalisme Indonesia pada dan Menjelang Abad XXI*, Bina Darma, Salatiga.
- Lukas, Anton, 1989. *Peristiwa Tiga Daerah. Revolusi dalam Revolusi*. Jakarta : Grafiti.
- Lukas, Antón, 1985. "The Tiga Daerah Affair: Social Revolution, or Rebellion?", dalam Audrey R. Kahin, ed. *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution Unity from Diversity*. Honolulu: University of Hawaii Press, hal. 23-46.
- Manguin, Pierre-Jves.B, 1993. "The Vanishing Jong: Insular Southeast Asian Fleets in Trade and War", dalam Anthony Reid, ed. *Southeast Asia in Early Modern Era*. Ithaca : Cornell University Press, hal. 197-213.
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene, 1990. *Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990's*. New York: William Morow and Co.
- Nash, Ronald H, 1969. ed. *Ideas of History. Volume II*, Toronto and Vancouver : Clarke, Irwin and Company.
- Parera, Frans M, 1993. "Persepsi Mengenai Nasionalisme dalam Pembangunan pada Masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur", dalam *Seminar Nasionalisme Indonesia pada dan Menjelang Abad XXI*, Bina Darma, Salatiga.
- Poerbatjaraka, R.M.Ng, 1957 (1952). *Kapustakan Djawi*. Djakarta Djambatan.
- Polinggomang, E.L., 1991. *Proteksi dan Perdagangan Bebas : Kajian tentang Perdagangan Makasar pada Abad ke-19*. Disertasi tak diterbitkan pada Vrije Universiteit Amsterdam.
- Rahardjo, Imam Toto K dan Herdiyanto WK, eds, 2001. "Lahimya Pancasila", dalam *Bung karno dan Tata Dunia Baru. Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta : Grasindo, hal. 7-28.

Reid, Anthony, 1993. *Southeast Asia in the Early Modern Era*. Ithaca and London : Cornell University Press.

Shiraishi, Takashi , 1990. *An Age in Motion. Popular Radicalism in Java, 1912-1926*. Ithaca and London : Cornell University Press, hal. XI.

Sinar, Luckman, 1995. "Sumatera Timur Menjelang Proklamasi dan Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia", dalam *Konferensi Internasional Revolusi Nasional*. Jakarta.

Sjamsuddin, Nazaruddin, 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta Gramedia.

Slametmulyana, 1979. *Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhara Karya Aksara.

Soejono, R.P ed, 1984. "Jaman Prasejarah di Indonesia", dalam Marwati Dj. P dan N. Notosusanto, eds. *Sejarah Nasional Indonesia*, I. Jakarta : Balai Pustaka.

Sundhaussen, Ulf, 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta LP3ES.

Tjandrasasmita, Uka, ed, 1984. "Jaman Pertumbuhan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia", dalam Marwati Djoened Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, eds. *Sejarah Nasional Indonesia*, III. Jakarta : Balai Pustaka.

Todaro, Noel, 1999. "Persatuan Nusantara, Renungan tentang Kawasan Melayu-Indonesia dan Filipina sebagai Lapangan Penelitian Sejarah", dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary, eds., *Panggung Sejarah*. Jakarta : Ecole Francaise d'Extreme-Orient/Pusat Penelitian Arkeologi Nasional/Yayasan Obor Indonesia, hal. 151-161.

Yuliati, Dewi, 2000. *Semaoen. Pres Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*. Semarang : Bendera.

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama lengkap	Agustina Magdalena Djulianti Suroyo
Tempat dan tanggal lahir	Cirebon, 18 Februari 1937
N I P	130 516 885
Jabatan Fungsional	Guru Besar
Pangkat / golongan	Pembina Utama / IV b
Bidang Studi	Sejarah
Fakultas / Unit	Sastra, Universitas Diponegoro
Alamat Rumah & Telp.	Jl. Cemara Raya No. 7, Banyumanik, Semarang 50267, Telp. 024 - 7473085

Pendidikan

SD Taman siswa lulus tahun 1950 di Pematang Siantar
SLTP Santa Ursula lulus tahun 1953 di Jakarta
SLTA Santa Ursula lulus tahun 1957 di Jakarta
Sarjana Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, lulus tahun 1969 di
Universitas Gajah Mada Yogyakarta
Kuliah Sejarah Sosek Eropa, 1 September 1976 sampai dengan 30
Agustus 1977 di Rotterdam, Nederland
Riset Sejarah di Nederland pada tahun 1985
Doctor Jurusan Humaniora Sejarah, lulus tahun 1989 di Universitas
Gajah Mada Yogyakarta.

Pekerjaan

- Dosen tetap, dari tahun 1975 – sekarang.
- Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan, 1978 - 1980.
- Ketua Jurusan Sejarah, 1989 - 1996.
- Ketua Pusat Penelitian Sosial Budaya Lembaga Penelitian Undip, tahun 1997 - sekarang.
Ketua Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara
Lembaga Penelitian Undip, tahun 2000 - sekarang.
Anggota Senat Universitas Diponegoro, 1 April 1999 - sekarang.

1. Conference on Comparative History of India and Indonesia pada tahun 1985, diselenggarakan oleh Pemerintah Belanda di Leiden.
2. First Conference on Indonesia Modern History pada tahun 1991 diselenggarakan oleh LIPI di Jakarta.
3. Simposium Internasional Humaniora pada tahun 1993 diselenggarakan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.
4. Eleventh International Economic History Congress pada tahun 1994 oleh Universitas Commerciale Luigi Bocconi di Milano
5. Colloquium on Historical Foundation of a National Economy pada tahun 1994 oleh Universitas Amsterdam di Amsterdam.
6. First Conference on Indonesia Maritime History pada tahun 1999 diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro di Semarang.
International Workshop on Southeast Asia Studies pada tahun 2001 diselenggarakan oleh KITLV di Leiden.

Disertasi

1. Kerja-Wajib sebagai Eksploitasi Kolonial. Perkembangan di Keresidenan Kedu: 1800-1890.

Penelitian

1. Lokasi Pusat Kerajaan Pajang dan Latar Belakang Sejarahnya, 1991/1992.
2. Penghayatan Etika Jawa di Kalangan Staf Pengajar Fakultas Sastra UNDIP, 1993
3. Sejarah dan Budaya Maritim di Lasem, 1994.
4. Penelitian Lokasi Bekas Kraton Demak, 1994/1995.
5. Penelitian tentang Potensi Pagelaran Wayang Purwo Dalam Pembangunan, 1994/1995.
6. Revolusi dan Mentalitas, Cepu Sekitar Revolusi Kemerdekaan 1945-1949, 1994.
7. Kawasan Laut Jawa Dalam Abad Transisi Tahun 1870-1970, 1996.
8. Kawasan Laut Jawa Dalam Abad Transisi Tahun 1870-1970 (Bagian II Tahun 1909 -1940), 1998.

- 9 Kawasan Laut Jawa Dalam Abad Transisi Tahun 1870-1970 (Bagian III Tahun 1940 -1970), 1999.

Publikasi

1. Tenaga Kerja dalam Sistem Masyarakat Tradisional-Kolonial Perkembangannya di Jawa pada Abad XIX, dimuat dalam Majalah Penelitian Tahun VII/27 Juni 1995, ISSN 0215-2584.
2. **Sejarah Universitas Katolik Sugiyopranoto 1964-1995**, Buku Cetakan tahun 1996, ISBN 979-8366-18-2.
3. Aktivitas Kemaritiman dan Sumbangan pada Integritas Nasional, dimuat di Lembaran Sastra No. 20/96, ISSN 0852-0704.
4. State run Cultivation in Java and the Colonial State, dimuat di Majalah Historical Foundations of a National Economy in Indonesia 1890s – 1990s, ISSN : 0444-65807-5 tahun 1996.
5. The Chinese in Javanese Rural Society in Nineteenth Century, makalah disajikan dalam second International Symposium on Humanities Ling & History, Yogyakarta 26-27 April 1993.
6. Revolusi Kepahlawanan dan Pembangunan Bangsa, makalah pada Seminar Sejarah Oleh Jarahnitra Yogyakarta, 15-16 November 1994.
7. Sejarah Maritim dan integrasi Nasional Aspek Maritim dalam Setengah Abad Studi Sejarah Indonesia, disajikan dalam Seminar Setengah Abad Budaya Indonesia, Semarang, 11-12 September 1995.
8. Problems of Sources and Methods in Indonesian Maritime History, makalah disajikan dalam Seminar Internasional tentang Sejarah Sosial Indonesia, Jakarta/Depok, 8-11 Desember 1997.
9. **Eksplorasi Kolonial Abad XIX. Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 1800-1890**, Yogyakarta, Yayasan Untuk Indonesia, cetakan tahun 2000, ISBN 979-8681-32-7.
10. **Sejarah Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik** (monografi), buku cetakan tahun 2001, ISBN 979-8366-40-9.
11. Laut, Kekuasaan di Laut dan Integrasi Nasional, makalah pada Lustrum VII Fakultas Sastra Undip, Semarang (Seminar Internasional), 1999.